

Kajian Sistem dan Posedur Manajemen Persediaan Barang Milik Negara
Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

Iskandar Zulkarnain Baga
W.F. Pesoth

***Absrtact** The purpose of this study was to obtain a picture of how the implementation and Inventory of State Property, as well as how to assess whether the fixed assets and inventories are in line with Government Regulation No. 6 of 2006 on the management of state property / area.*

The research was conducted at the Agency for Education Quality Assurance of Gorontalo. The data used in this study was secondary data, namely implementation of Recording Fixed Assets and Inventory of State Property Authority which implemented by User and Administrator of Goods as well as Good Inspection Reports conducted by the Inspectorate of the Ministry of Education and Culture. The methodology used in this study was a descriptive approach. The study description was intended to create a systematic, factual and accurate information on the facts and the properties of certain populations, and because of the use of qualitative data in descriptive study, most of the data rely on the written words or behavior, and interviews that can be observed from the informants. An in-depth interview was conducted to 15 informants referred to the Head of Sub Division of General and Section Chief and staff.

The results of this study show that the Recording of Fixed Assets and Inventory of State Property held by the Goods user authority, the Board of Goods was not fully in accordance with Government Regulation No. 6 Year 2006 on the Management of Goods, while the report and the procurement of goods, the administration of goods, adherence to applicable regulations, and the assessment of effectiveness and assessment of achievement of the program , have not been done thorough audit of the items that would produce the number of the existing units, and the value of in rupiah against the goods. The assessment property and equipment was done using the cost method, and the assessed value. The assessment of supplies has not been implemented.

***Keywords:** Assessment System and Procedure, Property Inventory Management*

Berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Ayat (1) Barang milik negara adalah semua barang yang

*Iskandar Zulkarnain Baga adalah Lulusan Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
W.F. Pesoth adalah Dosen Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat*

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolahan yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah, pembatalan penghapusan, dan rampasan/sitaan, Ayat (3) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 pasal 6 ayat (2) a. menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara; b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinya; c. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu membuat pemerian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Husaini dan Purnomo, 1995:4). Penelitian deskriptif banyak menggunakan data kualitatif sehingga lebih bertumpu pada tulisan ucapan atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri (Bogdan dan Taylor, 1992). Menurut Kuncaraningrat dalam Soeratio (1999:125) bahwa analisa data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan. Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif. Lain halnya apabila data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, maka analisis kuantitatif yang harus dikerjakan. Atas dasar berbagai pengertian tersebut, maka diharapkan dapat mengembangkan konsep, menghimpun data yang didukung oleh data dan diteliti kebenarannya yang selanjutnya penelitian ini dideskripsikan sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan dan dapat bermanfaat bagi kepentingan praktis maupun ilmu pengetahuan.

Sumber data utama dalam penelitian ini sebagaimana yang oleh lofland sebaigamana dikutip oleh Moleong, (1995) ialah “ kata kata dan tindakan “orang orang yang diamati atau diwawancarai dan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka sumber data dalam penelitian ini adalah dari dilakukan pada Sub Bagian Umum, 1 orang Kepala Sub Bagian Umum. 1 orang Bendahara Rutin, 1 orang di Perlengkapan, 1 orang Operator SIMAK BMN, 2 orang di Perencanaan, 2 orang di Tatalaksana Rumahtangga, 2 orang di panitia pengadaan, 5 dari staf seksi- seksi yang ada di di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo.

Penelitian ini difokuskan pada sistem dan prosedur manajemen pencatatan administrasi barang dan persediaan Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum, Bendaharawan Keuangan, Koordinator Perencanaan, Koordinator Perlengkapan, sehingga pemahaman akan tersusunnya sistem dan prosedur manajemen persediaan Barang Milik Negara di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo, guna untuk melakukan penilaian aktiva tetap dan persediaan barang dalam penyusunan neraca.

Data diperoleh dengan menggunakan tiga cara pertama yaitu wawancara mendalam dan terbuka, kedua pendekatan Penelitian deskripsi ini bermaksud membuat pemeriaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta ketiga yaitu dokumentasi di mana peneliti melakukan dokumentasi catatan-catatan administrasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan prosentase.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 087/2003, lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di bawah Depdiknas (sekarang Kemdikbud). Dalam kegiatan sehari-hari LPMP dikoordinasikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan.

Lembaga penjaminan mutu pendidikan memiliki tenaga struktural berjumlah 61 (enam puluh satu) orang, tenaga fungsional 11 (sebelas) orang dengan jenjang pendidikan S2 30 (tiga puluh) orang, S1 26 (dua puluh enam) orang, dengan jumlah seluruhnya 72 (tujuh puluh) orang terdiri dari golongan IVb 3 (dua) orang, golongan IVa 11 (sebelas) orang, golongan IIIc 3 (tiga) orang, golongan IIIb 2 (dua) orang, IIIa 37 (tiga puluh tujuh) orang, golongan IIIa 4 (empat) orang, golongan IIc 2 (dua) orang, golongan IIa 12 (dua belas) orang, golongan Ic 1 (satu) orang.

Disamping tugas-tugas kelembagaan LPMP Gorontalo yang dipimpin oleh Kepala Lembaga, juga di bantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Seksi yang terdiri dari: Kepala Seksi Program dan Sistem Informasi, Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, dan Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan.

Rangkuman Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan kepada sebanyak 15 pegawai yang kerja di lembaga penjaminan mutu pendidikan gorontalo, hasil wawancara yang berkaitan dengan beberapa jenis pekerjaan tersebut dapat dibuatkan rangkuman sebagai berikut :

1. Tidak berjalannya sistem manajemen barang milik negara secara optimal pada tupoksi diantara pimpinan serta pegawai. Contohnya masih kurangnya koordinasi pekerjaan antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan bagian perlengkapan, bagian perencanaan, secara umum hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai kurang memiliki ketrampilan konseptual yang memadai. (1) Secara rinci dapat digambarkan sebagaimana berikut : masalah yang dihadapi dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa panitia tidak dapat mencari jalan pemecahan bersama atau koordinasi dengan bagian perlengkapan. (2) masih nampak terjadinya kesalah pahaman mengenai administrasi barang dan jasa dan tidak tercatatnya beberapa barang milik negara di beberapa buku barang.
2. Ketrampilan teknis pegawai memahami manajemen, mekanisme dan prosedur serta menggunakan metode yang tepat dalam penyelesaian pekerjaan barang milik negara masih kurang pemahamannya terhadap pekerjaan tersebut, di karenakan di bagian perlengkapan masih kurang pegawain serta pegawai lain

malas di mutasi ke perlengkapan, masih ada anggapan pekerjaan di perlengkapan berat dan melelahkan.

3. Pimpinan masih kurang dalam hal memimpin dan mempengaruhi bawah untuk mengikuti kehendaknya terutama dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan barang milik negara. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut : Pimpinan tidak dapat mengambil keputusan yang tegas bila terjadi permasalahan dalam tender barang dan jasa.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan Tahun anggaran 2011 ada kegiatan yang telah dilaksanakan dan ada juga yang belum atau tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo, antara lain sebagai berikut.

1. Sub bagian Umum belum menyusun standarisasi barang, standarisasi kebutuhan, dan standarisasi harga secara periodik sesuai acuan pada standar harga barang yang di keluarkan oleh Kemdikbud
2. Sub Bagian Umum khususnya Perencanaan, Perlengkapan tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) hal ini disebabkan seksi-seksi tidak menyampaikan RKBU,
3. Saat penelitian dilakukan (Bulan Agustus 2011) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan belum membuat Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU) hal ini disebabkan belum menyampaikan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) setiap seksi seksi.

Metode penilaian yang dipergunakan bagi barang-barang yang masih ada dokumennya dinilai berdasarkan harga perolehan akan tetapi bagi barang-barang yang sudah tidak ada lagi dokumennya dinilai dengan harga taksiran. Penilaian terhadap barang persediaan (alat tulis kantor) hingga saat ini belum dilakukan penilaian.

Maka dengan demikian besar kecilnya kesalahan atau kelalaian karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Barang Milik Negara dapat mempengaruhi kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo. Hendaknya bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo menjadikan ukuran terhadap besar kecilnya kesalahan baik itu administratif maupun kinerja personal yang diukur dari hasil temuan Itjen Kemdikbud sebagai acuan dalam menentukan perlu tidaknya menambah anggaran belanja Barang Milik Negara yang akan di anggarkan tahun 2012 ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan.

1. Kelemahan umum pengelolaan barang milik Negara di lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo ialah tidak berjalannya secara optimal para penanggungjawab atau fungsi-fungsi organisasi dalam pengelolaan dan penatausahaan barang pada lembaga beserta jajarannya, ketidaklengkapan dan pelaporan pada setiap bagian-bagian organisasi.
2. Kelemahan khusus staf perencanaan tidak menganalisa kebutuhan kegiatan yang berupa program lembaga baik itu diklat atau pengadaan barang dan jasa.

3. Inventarisasi dan stok opname barang milik Negara hanya dilakukan bila ada audit dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud atau pemeriksaan dari instansi yang terkait.
4. Pengelola Barang belum melaksanakan pencatatan barang secara tertib dan teratur ke dalam Buku Induk Inventaris Barang.
5. Penilaian aktiva tetap yang digunakan metode *historis cost* (harga perolehan), dan nilai taksiran. Penilaian terhadap persediaan (alat tulis kantor) belum dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo sebagai berikut.

1. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo agar meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan kesalahan penyajian informasi dalam Laporan Keuangan. Reviuw Internal bisa dilakukan dengan memberdayakan Satuan Pengawas Internal yang telah ada maupun dengan memfungsikan pengawasan berjenjang di masing – masing instansi.
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo agar menegur secara tertulis kepada Bendahara Rutin, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Sub Bagian Umum sebagai penanggungjawab program kegiatan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo.
3. Selama Ini Inspektorat Jenderal perannya sebagai Pembina, hanya melakukan pendampingan teknis penyusunan Laporan Keuangan pada bagian keuangan saja seharusnya pendampingan teknis juga pada bagian pengelolaan Barang Milik Negara agar dalam rangka membantu meningkatkan mewujudkan laporan keuangan yang andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond., 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Bogdan, R. and Taylor, J. S., 1992, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Alih bahasa Arief Furchan, Edisi I, Usaha Nasional, Surabaya.
- B P K Perwakilan II DIY bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Gadjah Mada, 2001, Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik, *Workshop Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Sektor Publik*.
- , *Auditing (Pengauditing) II*, 2002, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta.
- , *Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1985.
- Hanafi, M. M., 2003. *Manajemen*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko, H., 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Harujito, M., 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan Kedua. Jakarta : Gramedia

- MEP Angkatan XV Kelas A dan KKD PPE, 2002, *Modul Akuntansi Keuangan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , Departemen Keuangan, 2001, *Exposure Draft Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Pemerintah*.
- Midjan, L., dan Susanto, A., 2000, *Sistem Informatika Akuntansi I Pendekatan manual Praktik penyusunan metode dan prosedur*, Lembaga Informatika Akuntansi (LIA) Bandung.
- Moleong, L., J., 1995. *Metodo Penelitian kualitatif*, Remaja Karya Bandung.
- Nasir M., 1998. *Metodo Penelitian*, Jakarta : Galia Indonesia.
- Republik Indonesia, “Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4268*.
- Siswanto, H.B., 2008. *Pengantar Manajemen*. Cetakan Keempat. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soeratno dan Arsyad, L., 1999, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN Yogyakarta.
- Sujana, E., 2001, “*Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah*”, *Tesis S-2*, Program Pascasarjana-UGM, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)
- Tim MEP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001, *Evaluasi DAU 2001 Aspek Pemerataan Horisontal*, Magister Ekonomika Pembangunan UGM, Yogyakarta
- Wilson B, 2008. *Intisari Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.